



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BONTANG
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DASUKI**
2. Jabatan : **ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
3. NHK : **478686**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 941.000.000

1. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA KUTAI , HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 199 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL
SENDIRI Rp. 40.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL
SENDIRI Rp. 40.000.000
4. Tanah Seluas 20300 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA,
HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA,
HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
6. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL
SENDIRI Rp. 11.000.000
8. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL
SENDIRI Rp. 40.000.000
9. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL
SENDIRI Rp. 25.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/143 m2 di KAB / KOTA KOTA
BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 137.500.000



1. MOTOR, YAMAHA 28D (AL115S/MIO) Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, MB PENUMPANG JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 26.950.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 40.620.239

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.146.070.239

III. HUTANG Rp. 25.240.614

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.120.829.625

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.